



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI PURNOMO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
3. NHK : **757654**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.025.600.000**

1. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 3.342 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.670 m2/350 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 995.000.000
4. Tanah Seluas 1.681 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 855.000.000
5. Tanah Seluas 3.591 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
6. Tanah Seluas 3.342 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
7. Tanah Seluas 4.095 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 659.200.000
8. Tanah Seluas 3.565 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 576.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 280.700.000**

1. MOBIL, MITSHUBISHI TRUCK Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000



2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
3.700.000

3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 795.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 123.377.044

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.224.677.044

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.224.677.044

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.